

Nasionalisme dan Negara Bangsa*

Cornelis Lay •

Abstract

Current issues and challenges have placed nationalism into a difficult position. This leads to the dichotomy of tribalism and globalism or between fragmentation and integration. In Indonesia, the difficult position of nationalism may result from the view that nationalism is equal to a political stream, is interpreted internally, is applied to various interests and means anti-foreign investment. This article discusses the requirements to use civil administration and self-conscious patriotism for understanding nationalism.

Kata-kata kunci:

Nasionalisme; globalisme; tribalisme; Indonesia

Pembuka

Nasionalisme dan negara-bangsa (*nation-state*) sebagai wadah organisasional yang membungkusnya, yang merupakan dua kekuatan terbesar yang mendominasi wacana politik dunia selama abad ke-20, secara bertahap tetapi pasti mulai berhadapan dengan sejumlah

* Tulisan ini pernah disampaikan pada acara Pengantar Kaderisasi GMNI, Yogyakarta, Bantul, 22 September 2006.

• *Cornelis Lay* adalah staf pengajar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM, Yogyakarta. Ia bisa dihubungi melalui e-mail: conny@ugm.ac.id

tantangan yang menempatkan keduanya dalam posisi cukup sulit. Semakin meluasnya gejala pembentukan blok-blok ekonomi di tingkat global, bergesernya arena pengambilan keputusan ekonomi-politik dari organ-organ otonom negara ke tangan sejumlah terbatas lembaga (keuangan) internasional - IMF, Bank Dunia - dan *multi-national corporations*, serta semakin terintegrasinya masyarakat ke dalam sistem dunia, memastikan bahwa perkembangan peradaban manusia sedang bergerak ke arah globalisme yang membentur secara langsung jantung keabsahan nasionalisme dan negara-bangsa.

Sejak berakhirnya perang dingin, dunia dilanda oleh arus perubahan yang bersifat global yang ditandai dengan perkembangan sistem informasi dan transportasi yang semakin mempersingkat jarak dalam hubungan antara bangsa ataupun daerah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah menerabas batas-batas negara dengan akibat yang sangat serius pada kedaulatan politik sebuah bangsa, kemandirian ekonomi, dan identitas kultural sebuah bangsa.

Pada saat yang bersamaan namun di aras yang lain, kita juga menyaksikan tumbuhnya negara-negara baru dari reruntuhan Uni Soviet, bangkrutnya Yugoslavia, dan masih sederet contoh lain, semisal perang, bahkan pembantaian etnik. Kesemuanya meyakinkan kita bahwa peradaban manusia juga sedang bergerak ke arah tribalisme sebagai raut penyangkalan lain atas nasionalisme dan negara-bangsa. Masyarakat di berbagai belahan dunia sedang bergerak ke arah pencarian identitas diri baru yang melekat dalam simbol-simbol yang lebih sempit dari negara-bangsa. Dengan kata lain, masyarakat dan individu-individu di berbagai belahan dunia sedang mengambil langkah surut untuk memasuki komunitas yang terbentuk bukan berdasarkan asosiasi-asosiasi politik ataupun batas-batas negara tapi terbentuk oleh kesamaan agama, kultur, etnik, atau kesamaan-kesamaan pengalaman lainnya.

Kecenderungan-kecenderungan di atas mengindikasikan bahwa dunia tampak sedang bergerak ke dua arah yang saling berhadapan, yakni tribalisme dan globalisme ataupun fragmentasi dan integrasi. Kedua-duanya merupakan tekanan besar bagi nasionalisme dan negara-bangsa. Lebih lagi, pergerakan di atas, dalam banyak kasus, melibatkan kekerasan sebagai energi penggerak aktual. Horseman dan

Marshall (1995: 177) secara akurat merumuskan kedua fenomena di atas dengan "*If it is underlible live that world Is becoming increasingly integrated, it is similarly a fact that population throughout the world are retreating into tribalism of an exclusionary, often violent nature*".

Kedua tendensi - globalisme dan tribalisme - di atas, menurut sejumlah ahli merupakan respon atas perubahan *nature* dan jangkauan kapitalisme, perubahan hubungan antara warga negara dengan struktur pemerintahan yang ada, kemajuan teknologi dan perubahan pasar, dan kealpaan suatu kekuatan hegemonik di tingkat dunia yang mampu mensponsori terbentuknya suatu sistem global. Gejala-gejala di atas menjadi alasan yang kuat bagi banyak orang untuk mulai berceritera tentang ketidakgayuhan nasionalisme dan negara bangsa di masa-masa datang. Negara-bangsa dan nasionalisme yang dalam dua abad terakhir diterima sebagai *given* oleh hampir semua bangsa dan masyarakat manusia mulai dipersoalkan keabsahannya.

Sekalipun keraguan atas kedigdayaan nasionalisme di atas belum cukup luas berkembang, dan sekalipun ahli semisal Pfaff (1993) masih tetap percaya bahwa nasionalisme dan negara-bangsa masih akan tetap menjadi kekuatan politik paling penting di abad ke-21, sejumlah ahli seperti Horsman dan Marshall (1994) mulai berbicara tentang realitas dunia setelah era negara-bangsa. Di Indonesia pun, cukup banyak orang - ahli ataupun praktisi - mulai berbicara mengenai era post-nasionalisme atau yang lebih moderat, pasca-nasionalisme yang seakan berlomba dengan kegigihan pemerintah dan sejumlah ahli bertutur tentang era kebangkitan nasionalisme babak kedua.

Respons politik berupa penciptaan atau penghidupan kembali sejumlah lembaga yang melandaskan diri pada nasionalisme, seperti yang banyak mewarnai politik Indonesia dalam beberapa tahun selama era 1990-an yang muncul dalam bentuk YPKP, PCPP atau "PNI baru" serta munculnya partai-partai baru berbasis nasionalisme¹ pada era setelah runtuhnya Soeharto secara tersirat mengandaikan keselamatan negara-bangsa ini berada dalam taruhan dan nasionalisme Indonesia berada pada titik nadir. Kita sudah sedemikian sering mendengar

¹ Dari 48 partai peserta Pemilu 1999 tercatat PNI-Supeni, PNI Massa Marhaen, PDI Perjuangan secara jelas menunjukkan basis nasionalisme. Sumber: Wajah 48 Partai Peserta Pemilu 1999, www.kompas.com.

bahwa semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda Indonesia semakin memudar, sementara kritik-kritik luas dan keras terhadap semakin meluasnya gejala promordial juga terdengar berulang-kali. Kritik ini bahkan menjangkau tingkat negara. Hiruk pikuk perdebatan (politik) soal rapuhnya nasionalisme yang mengekor kehadiran Presiden AS beberapa waktu yang lalu merupakan contoh kongkrit dari gugatan atas pemerintah.² Sementara politik pengalihan perusahaan-perusahaan negara yang diandaikan sebagai simbol kedaulatan ekonomi negara bangsa, telah menjadi pusat kritik serius dalam beberapa tahun terakhir ini.³

Kecenderungan-kecenderungan sebagaimana digambarkan di atas – sejauh kita sepakat bahwa pilihan negara-bangsa yang dilakukan pendiri republik dan nasionalisme yang mengawalinya, merupakan pilihan paling logis bagi masyarakat Indonesia yang majemuk – mengharuskan kita untuk melakukan kajian yang serius mengenai dua isu ini. Tulisan ini mencoba menggulirkan sejumlah catatan yang mudah-mudahan bisa dipakai sebagai dasar diskusi bersama.

Asal-Muasal

Kajian atas nasionalisme dan bangsa, dan juga negara-bangsa, hingga kini masih tetap diperdebatkan oleh para ahli. Bagi sejumlah ahli, bangsa dan kesadaran berbangsa diyakni merupakan representasi atau perwakilan dari negara masa lalu yang terlibat dalam upaya-

² Kedatangan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush di Istana Bogor pada 26 November 2006 lalu menuai penolakan dari berbagai kalangan. Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan penolakan atas kedatangan Bush yang dinilai hanya sebuah kedok memperpanjang cengkeraman imperialisme di Indonesia. Sedangkan Amien Rais berkomentar persiapan pemerintah Indonesia untuk menyambut Bush dinilainya sangat berlebihan. Sumber: Statement Penolakan Kedatangan Bush, Perhimpunan Rakyat Pekerja, Senin, 13 November 2006 dan "Amien Rais: Terima Saja Bush Ala Kadarnya, Terus Suruh Dia Pulang", Senin, 13 November 2006, www.erasmuslim.com).

³ Kompas mencatat, sepanjang sejarah privatisasi, ada dua privatisasi yang kontroversial, yaitu Cemex di Semen Gresik (1998) dan Singapore Technologies Telemedia di Indosat. Keduanya dilakukan dengan metode mitra strategis. Sumber: Tomi Prasetyantono, *Akhir Elegan Sengketa Cemex*, Rabu, 29 Maret 2006, www.kompas.com.

upaya melalui proses sejarah yang panjang realisasi diri. Bangsa dalam makna ini adalah suatu entitas primordial yang merupakan bawaan yang melekat dalam *nature* dan sejarah manusia sebagai sebuah kelompok. Secara obyektif suatu bangsa dapat diidentifikasi lewat perbedaan-perbedaannya dengan bangsa lain dalam hal cara pandang, keterikatan dengan tanah air, dan perjuangan-perjuangan untuk mendapatkan otonomi politik.

Seton-Watson (1977) misalnya melihat rasa kebangsaan di kalangan masyarakat di benua Eropa sudah muncul sejak periode barbarian. Connor (1991) yang mengutip klaim Bloch menegaskan, kesadaran berbangsa di Inggris, Perancis, dan Jerman sudah sangat maju pada tahun 1100. Kesimpulan ini juga diperkuat oleh klaim Huizinga yang dikutip Connor yang menilai kesadaran berbangsa di Eropa sudah meluas selama abad pertengahan. Hanya saja, para ahli di atas tetap mengakui bahwa kesadaran berbangsa yang ada, masih tenggelam di bawah prinsip-prinsip keagamaan dan dinasti hingga abad ke-19 dimana nasionalisme mulai mendapatkan bentuk jadinya, terutama setelah adanya penyebaran gagasan-gagasan tentang kedaulatan rakyat yang mengidentifikasi massa rakyat sebagai sumber kekuasaan dan nilai. Dengan kata lain, nasionalisme mendapatkan momentumnya untuk berkembang secara pesat bersamaan dengan meluasnya gagasan tentang demokrasi – gagasan tentang kedaulatan rakyat.

Dalam konteks di atas, nasionalisme dan negara-bangsa membutuhkan penciptaan “mitos” tentang bangsa. Kesamaan sejarah, mistifikasi masa lalu, penciptaan serangkaian ritual, penemuan tingkah-laku dan tradisi bersama, dan sebagainya, akhirnya diciptakan untuk kemudian didesiminasikan ke tengah-tengah masyarakat guna menegaskan klaim tentang bangsa. Pengajaran sejarah Indonesia bisa dilihat sebagai contoh dimana konsepsi tentang Indonesia sebagai sebuah bangsa telah dirunut jauh ke dalam pengalaman sejarah masa lalu yang jauh, bahkan hingga ke periode Gadjahmada dengan sumpah Palapanya yang sangat monumental. Indonesia bukan sebuah pengecualiaan. Pengalaman yang sama bisa kita temukan dalam pengalaman kebanyakan bangsa di dunia.

Dengan logika di atas, maka tampak jelas bahwa nasionalisme dilihat sebagai fenomena sejarah primordial. Nasionalisme dilihat

sebagai suatu pertautan emosi dimana komunitas politik muncul dan lewat nasionalisme ini komunitas etnik menemukan ekspresi sejarah dan kematangannya. Tetapi hal ini tidak sepenuhnya benar. Etnisitas dan agama, misalnya, memang merupakan elemen-elemen penting yang membentuk *sense* tentang komunitas – bahkan hingga kini masih luas dipakai guna menjustifikasi politik eksklusivisme dan nasionalisme sempit – tapi kesamaan akar etnik dan agama yang diekspresikan antara lewat kesamaan bahasa, kultur populer, bahkan sebatas makanan dan minuman lebih bermakna sebagai alat pembuktian bahwa nasionalisme adalah “natural” (alamiah), bukan sebagai fondasi yang kuat untuk membentuk bangsa. Nasionalisme tidak punya kaitan dengan purinitas etnik ataupun kesamaan agama, bahasa dan kultur, tetapi meminjam istilah Horsman dan Marshall, “*a belief in the political nation*”. Kisah bubarnya persekutuan negara berbasis kesamaan agama dan etnik di sepanjang sejarah peradaban manusia membuktikan hal ini. Tidak mengherankan jika klaim legitimasi suatu bangsa, begitu ujar Smith (dikutip dalam Horsman dan Marshall), didasarkan pada aspirasi suatu masyarakat majemuk untuk menyatukan diri dalam makna kultur politik dan komunitas politik, bukan atas dasar garis etnik ataupun agama. Rumusan dan keyakinan seperti ini akan sangat jelas kalau kita telusuri kembali tulisan-tulisan para pendiri republik ini, terutama Bung Karno yang mekombinasikan perumusan-perumusan akar nasionalisme pada pengalaman bersama masa lalu, cita-cita masa lalu yang dikombinasikan dengan konseptualisasi tentang geopolitik – *libesraum* – sebagai ruang pengikat.

Sejak tahun 1960-an, pemikiran nasionalisme yang bercorak primordial di atas mulai didebat oleh banyak ahli. Deutch (1966), Gellner (1983), Hobsbawm (1990) dan Anderson (1983), memunculkan ide baru yang memposisikan bangsa – dan dengannya, nasionalisme – sebagai institusi modern tanpa preseden sebelumnya. Negara-bangsa merupakan “*political site*” dari modernitas. Nasionalisme dan negara bangsa bukan merupakan gejala yang sudah ada sebelumnya dalam peradaban politik manusia, tetapi fenomena baru yang lahir dan berkembang dalam dan dilahirkan melalui rahim kapitalisme. Hobsbawm, misalnya menegaskan, kata “*nation*” di Eropa sebelum abad ke-19 tidak punya makna kultural dan politik apapun. Lewat penelusuran yang serius ia menyimpulkan bahwa tidak ada konsep yang dilandaskan pada kesamaan bahasa yang punya implikasi politik

sebelum abad ke-19. Dengan kata lain, etnisitas ataupun bahasa, tidak pernah menjadi fondasi dalam membentuk identitas politik yang disebut sebagai bangsa dalam sejarah perkembangan masyarakat Eropa, kecuali setelah abad ke-19, periode awal perkembangan kapitalisme.

Mengalir dari argumentasi sejumlah ahli di atas, Hutkinson (1994) mengidentifikasi lima perbedaan mendasar antara bangsa sebagai gejala modern dengan bentuk-bentuk pengorganisasian masyarakat yang pernah dikenal sebelum abad ke-19. Pertama, negara-bangsa mendasarkan legitimasi pada "*will*" (kemauan) masyarakat. Ini adalah visi rasionalis baru mengenai humanitas yang baru muncul di tengah-tengah gegap gempitanya revolusi Perancis. Kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa menjadi dasar bagi kehadiran negara bangsa.

Kedua, teritorial antara negara-bangsa dengan organisasi sebelumnya berbeda. Teritorial negara-bangsa bukan merupakan kelanjutan atau warisan dari basis teritorial bentuk-bentuk pengorganisasian politik sebelum abad ke-19. Bangsa dan negara-bangsa mengontrol basis teritorial yang sama sekali berbeda dengan basis teritorial bentuk-bentuk pengorganisasian politik masa lalu. Bahkan fakta dari kebanyakan negara dunia ketiga memastikan, teritorial negara-bangsa merupakan batas-batas administrasi ruang ekspansi kapitalisme dan kolonialisme sebagaimana diekspresikan lewat pengalaman Indonesia, Malaysia dan rata-rata negara dunia ketiga lainnya.

Ketiga, bangsa dibangun tidak di atas penaklukan atas batas-batas politik dan etnisitas seperti yang terjadi sebelumnya, tapi di atas kebanggaan dan penghormatan atas kepelbagaian (kemajemukan). Ia mencatat, hanya sejak abad ke-19 etnik-etnik minoritas tidak lagi menjadi target berulang kemarahan dan upaya penaklukan bahkan pembasmian oleh etnik besar dalam kerangka perluasan kontrol teritorial mereka. Hanya sejak abad ke-19 minoritas diterima sebagai bagian integral dari teritori sebuah negara-bangsa yang diperlakukan secara sama. Pada periode sebelumnya, kelompok-kelompok minoritas umumnya berada dalam status sebagai warga taklukan dari kelompok-kelompok besar dan teritorial mereka adalah bagian dari koloni kekuatan etnik besar sebagai sang penakluk. Perubahan di atas dimana minoritas menjadi bagian integral dari konsepsi bangsa dan negara bangsa memiliki implikasi sangat mendasar dalam tata politik pengelolaan modern: kemajemukan dan perlindungan atas minoritas

dipahami dan diterima sebagai sesuatu yang *inherent* di dalam konsep negara-bangsa. Karenanya, setiap bentuk penyangkalan terhadap kemajemukan adalah penyangkalan atas *nature* dari konsepsi bangsa dan negara-bangsa itu sendiri.

Keempat, bangsa adalah artefak dari "*print capitalism*" yang dalam raut riilnya hadir dalam rupa koran dan novel, memungkinkan suatu bangsa bisa dibayangkan. Anderson (1983) lewat karya monumentalnya yang sering dirujuk sebagai paradigma tersendiri dalam studi-studi tentang nasionalisme dan negara-bangsa melabelkan bangsa sebagai "masyarakat rekaan". Masyarakat yang secara tipikal tercipta berkat jasa *print capitalism*.

Kelima, bangsa adalah masyarakat industri dengan tingkat integrasi ekonomi yang tinggi ke seluruh bagian kewasannya. Bangsa dengannya, merupakan fungsi integrasi ekonomi modern.

Sebagai fenomena modern – dan secara praktis elemen paling fundamental dalam kehidupan politik modern dan hubungan internasional – nasionalisme dan negara-bangsa menemukan momentumnya dalam revolusi Perancis. Apa itu nasionalisme dan negara-bangsa?

Pakta Perjanjian

Rumusan yang pasti mengenai nasionalisme dan negara-bangsa sangat sulit digagaskan. Tetapi kalau diperhatikan arena persepakansan awal konsepsi tentang nasionalisme dan negara-bangsa dan juga diikuti logika di balik kehadiran nasionalisme dan negara-bangsa yang tumbuh di negara-negara bekas jajahan, kita akan menemukan bahwa keduanya pada dasarnya adalah pakta perjanjian antara warga yang berdaulat dengan negara.

Nasionalisme dan negara-bangsa secara radikal telah merombak struktur kesetiaan politik rakyat dari kesetiaan kepada dinasti menjadi prinsip kedaulatan rakyat. Ia telah merombak secara radikal struktur kesetiaan pada tuan penjajah untuk digantikan dengan gagasan tentang kewarganegaraan. Ia telah mentransformasikan masyarakat dan individu dari posisi sebagai subyek pasif dalam politik menjadi warga negara aktif yang mengatur diri sendiri.

Sebagai suatu pakta perjanjian, nasionalisme dan negara-bangsa bukan saja mengandaikan kesejajaran antara massa rakyat dengan

penguasa, tapi sekaligus di dalamnya melekat impian-impian (harapan dan aspirasi) massa rakyat yang harus diwujudkan sebagai bagian integral dari pakta perjanjian. Kalau impian-impian massa rakyat – yang terkandung dalam semangat revolusi Perancis dan revolusi kemerdekaan negara-negara terjajah – dideretkan akan mudah ditemukan persoalan-persoalan, seumpama kesenjangan sosial-ekonomi, ketidaksamaan di muka hukum, diskriminasi politik-ekonomi-kultural, pengangkangan atas HAM, kemiskinan dan kemelaratan, eksploitasi dan penindasan dan masih sederetan isu lainnya yang menjadi substansi yang melegalkan secara moral dan politik kehadiran nasionalisme dan negara-bangsa.

Demokrasi, keadilan sosial, kesejahteraan, dan seterusnya, merupakan dimensi-dimensi *inherent* dalam gagasan besar nasionalisme dan negara-bangsa. Karenanya, adalah omong kosong untuk berbicara mengenai nasionalisme dan negara-bangsa tanpa dikaitkan dengan isu-isu di atas. Kita tidak bisa berbicara soal nasionalisme tanpa melihat demokrasi atau keadilan sosial, misalnya, sebagai ekspresi internal dari nasionalisme. Kita tidak mungkin berbicara soal nasionalisme kecuali negara mampu memfasilitasi terpenuhinya hal-hal di atas dalam kehidupan kita bersama sebagai bangsa. Dimensi inilah yang sangat lama terabaikan dalam diskusi tentang nasionalisme dan negara bangsa.

Dalam sebuah seminar di Salatiga sekitar 15 tahun yang lalu, Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, sejarawan senior dari Universitas Gadjah Mada, berdasarkan hasil kajian beliau atas dokumen-dokumen dalam pergulatan awal sebelum mencapai kesepakatan mengenai Sumpah Pemuda, mengungkapkan bahwa elemen-elemen prinsipil yang *inherent* dalam gagasan nasionalisme meliputi antara lain, kebebasan, kesamaan, demokrasi, keadilan sosial, dan prestasi. Sebagai sebuah pakta perjanjian antara warga negara dengan negara, nasionalisme mengharuskan adanya tanggung jawab dua pihak, yakni negara dan masyarakat. Di sisi masyarakat atau warga sebuah bangsa, tanggung-jawab di atas diekspresikan dalam bentuk kesediaan untuk menerima norma-norma moral dan legal dari kolektivitas, kesediaan untuk mempertahankan negara, termasuk membayar pajak, mendukung penguasa yang dinilai baik, dan seterusnya. Hal-hal di atas didorong oleh semacam *self-conscious belief* terhadap nasionalisme dan negara-bangsa yang ada.

Sementara di sisi negara hal ini diekspresikan dalam kapasitasnya untuk menawarkan rasa memiliki, afiliasi, bahkan identitas personal bagi setiap warganya. Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir ini dimana kapasitas *governability* negara dipakai sebagai rujukan tertinggi dalam menilai sebuah negara tuntutan akan kewajiban negara atas warganya di atas semakin diperluas. Pelabelan baru atas negara kini disusun secara hirarkhis berdasarkan kemampuannya - *governability* - dalam menyediakan apa yang disebut sebagai *political goods* bagi warga negaranya⁴ sebagai bagian dari realisasi kewajiban negara dalam kerangka nasionalisme dan negara-bangsa sebagai pakta perjanjian. Dari sudut warga negara, pakta perjanjian ini diekspresikan melalui pemenuhan kewajibannya warga negara dalam melakukan bela negara, dalam membayar pajak, dsbnya, sebagai bagian dari kewajiban-kewajiban politik warga negara atas negara dan bangsanya.

Persoalan Nasionalisme Indonesia

Kalau gagasan tentang nasionalisme dan negara-bangsa di atas dicermati, logisnya sangat sedikit orang akan tidak sepakat akan keduanya. Di dalam konsep nasionalisme dan negara-bangsa melekat semua nilai-nilai kemanusiaan tertinggi yang ingin dicapai oleh setiap peradaban manusia. Tetapi seperti terungkap pada tingkat praktis dalam masyarakat politik Indonesia, nasionalisme bisa dengan mudah melahirkan penolakan atau sinisme di kalangan masyarakat. Sementara di tangan penguasa, nasionalisme kadang digunakan sebagai alat untuk "mengintimidasi" warganya secara politik agar "menjauhi" sesuatu atau "menerima" sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani dan aspirasinya. Nasionalisme, dengannya, melegalisasi banyak hal

⁴ Suatu negara dikatakan kuat, lemah, gagal, kolaps, diukur dari kemampuan negara untuk menyediakan *political goods* bagi warganya. Urutan prioritas *political goods* yang harus disediakan negara yaitu: keamanan, hukum, kesehatan, pendidikan, *critical infrastructure*, sistem perbankan dan keuangan, *business environment*, forum yang menjamin kebebasan ruang bagi masyarakat sipil, *method of regulating environment commons*. Lihat Robert I. Rotberg, "The Failure and Collapse of Nation States: Breakdown Prevention dalam Robert I. Rotberg (ed), *When State Fail*, PUP, 2003. Robert I. Rotberg, *Failed States, Collapse States, Weak State: Cause and Indicators* dalam Robert I. Rotberg (ed), *State Failure and State Weakness in Time of Error*, PUP, 2004.

yang membuat maknanya sebagai suatu "pakta perjanjian" kehilangan sentuhannya. Mengapa nasionalisme Indonesia bahkan tampak mengalami kesulitan di hadapan massa rakyat dan pemerintahnya sendiri? Ada beberapa kemungkinan jawaban untuk ini.

Pertama, berkaitan dengan pemahamannya yang mendalam sebagai suatu ideologi. Ia bahkan dipahami sebatas sebagai salah satu dari aliran politik yang pernah malang-melintang di rimba raya politik (masa lalu) Indonesia. Karya klasik Feith (1962) yang bisa dirujuk sebagai salah satu contoh tipikal mengenai hal ini. Dikerangkengnya nasionalisme Indonesia dalam salah satu kekuatan politik di masa lalu, PNI utamanya, telah memerosotkan posisi nasionalisme sampai pada fase sebatas sebagai salah satu aliran (politik) yang harus berhadapan dengan kekuatan (aliran) ideologi politik lainnya. Padahal, nasionalisme, bukan semata-mata berfungsi sebagai ideologi. Sekalipun ia merupakan gejala yang bisa dengan mudah ditemui di sembarang belahan dunia, dan sekalipun ia menduduki dasar moral dan emosi sama seperti halnya dengan ideologi, ia tidak memiliki prinsip-prinsip universalitas - seperti sosialisme ataupun kapitalisme - yang memungkinkannya untuk diklaim semata-mata sebagai ideologi.

Dalam sejarah politik masa lalu Indonesia, kita mengetahui bahwa berbagai aliran politik, termasuk nasionalisme, yang tumbuh pada waktu ini terlibat dalam "perebutan", "perang" dan "konflik" tanpa henti dalam memperebutkan kekuasaan politik. Ketika nasionalisme dimengerti sebatas sebagai salah satu dari aliran politik di Indonesia, maka nasionalisme bisa dengan mudah akan diperlakukan sebagai lawan oleh aliran politik lainnya. Posisinya sebagai *property* bersama kita sebagai bangsa, dengan sendirinya memudar.

Anggapan-anggapan di atas menurut hemat penulis mengandung banyak kelemahan, justru karena substansi dari nasionalisme dan negara-bangsa seperti yang sudah dibicarakan pada bagian-bagian sebelumnya tak banyak diperhatikan. Dimensi internal nasionalisme dan negara-bangsa seperti keadilan sosial, kemerdekaan, demokrasi, kesamaan, dan prestasi seakan dilupakan dan praktis tidak menjadi perhatian penguasa di Indonesia, terutama selama Orde Baru. Tidak mengherankan jika meluasnya gejala perlawanan atas nasionalisme dan konsepsi tentang negara-bangsa Indonesia hadir dalam raut kekecewaan atas kegagalan negara memfasilitasi terpenuhinya hal-

hal di atas. Meluasnya tuntutan politik daerah, bahkan hingga pada munculnya kehendak dan gerakan untuk memisahkan diri dengan Indonesia, hampir sepenuhnya bersumber pada kegagalan negara kita menciptakan nilai-nilai **interinsik nasionalisme** di atas.⁵

Kedua, bertalian dengan praksis nasionalisme yang tampaknya lebih mengikuti logika nasionalisme internal menurut pembedaan Pater Alter (1989). Jenis nasionalisme seperti ini memberikan penekanan pada superioritas dan keabsolutan negara atas warganya dan mengabaikan substansi dari nasionalisme sebagai suatu pakta perjanjian antara warga negara yang bebas dengan negara. Sebagai sebuah pakta perjanjian, nasionalisme harus dipahami dalam bentuk yang oleh Alter disebut nasionalisme *risorgimento*. Nasionalisme jenis ini menekankan, bukan saja setiap bangsa memiliki hak untuk merdeka lewat negara, tapi juga setiap warga negara-bangsa yang bersangkutan memiliki hak yang sebanding untuk mengekspersikan diri, mendapatkan kemerdekaan dan kemungkinan untuk berkembang. Bung Karno telah sejak dini menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia, hanya sebatas "jembatan emas". Karena di dalam negara Indonesia yang merdeka, terletak kewajiban bagi negara dan kita semua untuk memerdekakan setiap individu. Dengan kata lain, bukan semata-mata kemerdekaan bangsa yang menjadi pusat perhatian dari nasionalisme, tapi sekaligus kemerdekaan individu yang menjadi warga dari bangsa yang bersangkutan.

Inilah dimensi internal nasionalisme yang tampaknya banyak diabaikan baik dalam pemahaman maupun praktek. Akibatnya, nasionalisme lebih menampakkan diri sebagai penerapan kekuasaan negara atas masyarakat, tanpa punya kemungkinan sebaliknya. Nasionalisme menjadi hak monopoli negara dan kewajiban mutlak masyarakat dalam ketidak-seimbangan hubungan yang mengengaskan.

⁵ Tuntutan pemisahan diri dari Aceh dan Papua dari NKRI, ditanggapi pemerintah dengan menetapkan otonomi khusus bagi dua daerah ini. Otsus berorientasi pada pengakuan akan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Papua asli dan memberi peluang untuk menangani kebutuhan-kebutuhan khusus penduduk daerah yang sangat beragam. Di Aceh, melalui kesepakatan Helsinki, tercapai kata damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah RI. Pasca kesepakatan, pemerintah mengundang UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam konteks di atas, nasionalisme akhirnya merosot drastis menjadi "keharusan untuk berkorban" bagi masyarakat, terutama pada tingkat produksi, tanpa efek apapun pada tingkat distribusi. Dalam kenyataan sehari-hari, kita melihat ekspresi nasionalisme semacam ini dalam bentuk keharusan menerima penggusuran atas nama pembangunan tanpa sedikitpun dipersoalkan nasib dari mereka-mereka yang tergusur. Demikian mudahnya otoritas politik di negeri ini di masa Orde Baru menuding anggota masyarakat yang menolak penggusuran sebagai "anti pembangunan" yang dalam makna lainnya "tidak nasionalis" adalah contoh paling baik untuk ini.

Dalam ungkapan lain, nasionalisme tidak berfungsi sebagai instrumen dialog antara masyarakat dan negara, tapi telah berubah menjadi instrumen sepihak dari pemegang kekuasaan guna memaksakan kehendaknya pada masyarakat. Bahkan, dalam kenyataannya selama Orde Baru nasionalisme telah menjadi instrumen sepihak dari kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat guna mengemas kepentingan sendiri untuk dipaksakan pada masyarakat. Persoalan seperti ini menemukan momentum untuk berkembang dengan sangat luas pada masa Orde Baru, bahkan hingga pada fase tidak terkontrol. Masuk akal jika kita menyaksikan selama periode nasionalisme represif ini, sinisme, cibiran dan ketidakpercayaan terhadap nasionalisme dan negara-bangsa tumbuh secara sangat luar biasa di sebagian masyarakat. Nasionalisme dilihat sebagai "kewajiban warga masyarakat untuk berkorban", tanpa hak yang berarti untuk ikut "menikmati".

Ketiga, bertalian dengan kenyataan bahwa nasionalisme kadang digunakan sebagai sarana untuk mengabsahkan atau membela sesuatu yang menurut bertentangan dengan logika yang melekat dalam hal yang bersangkutan. Kita sering berhadapan dengan kenyataan bahwa atas nama nasionalisme kita diharuskan untuk membenarkan langkah-langkah yang bahkan sangat merugikan negara dan bangsa secara keeluruhan. Banyak contoh kasus yang bisa kita temukan di sekitar kita selama era Orde Baru dimana nasionalisme secara gegabah telah digunakan untuk melegalisasi hal-hal yang sebenarnya tidak punya kaitan dengan kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan.

Keempat, nasionalisme Indonesia di era Bung Karno, lebih mewajah sebagai kata lain dari "anti modal asing" atau pada tingkat lebih sopan dikenal dengan autarki. Dengan ini, ia dengan mudah

mengundang kecurigaan, terutama bagi pemodal luar negeri, negara-negara donor, serta elemen-elemen nasional yang memiliki ideologi dan kepentingan langsung dengan isu ini. Ketergantungan kita yang cukup tinggi pada modal asing dan perubahan iklim ekonomi-politik dunia yang semakin cenderung untuk memuja pasar bebas dalam dua dasawarsa terakhir menyebabkan nasionalisme menemukan dirinya sebagai anak tiri dalam politik nasional kita. Apalagi, cukup berkembang keyakinan keliru di kalangan kita bahwa nasionalisme adalah milik eksklusif Bung Karno.

Karena sedemikian sering dan konsistennya Bung Karno mengumandangkan nasionalisme, secara tidak sadar banyak di antara kita kemudian menyimpulkan bahwa nasionalisme semata-mata merupakan persoalan Bung Karno dan tidak punya kaitan dengan kita sebagai bangsa. Padahal seperti sudah dibicarakan sebelumnya, nasionalisme menyangkut keseluruhan bangsa. Nasionalisme merupakan roh yang menjiwai sebuah bangsa. Nasionalisme memberikan arah, memberikan fondasi, dan sekaligus menjadi bingkai pengatur kehidupan bersama semua anak bangsa. Dengan cara seperti ini, nasionalisme memungkinkan sebuah bangsa memiliki kedaulatan dalam kehidupan politik, kemandirian dalam bidang ekonomi, dan identitas dalam bidang kultural. Ketiga hal di atas diimpikan oleh setiap bangsa dimanapun juga. Dan nasionalisme memberikan alasan bagi terwujudnya hal-hal di atas. Karena alasan di atas, sekalipun rumusan-rumusan yang tajam dan ilmiah tentang nasionalisme memang lebih banyak diwarnai oleh pemikiran dan pergulatan Bung Karno, sebagai "roh" dari sebuah negara-bangsa, nasionalisme adalah bagian intergral dari kita semua sebagai sebuah bangsa.

Penutup

Tanpa harus menurunkan sejumlah catatan akhir, tulisan ini saya sudahi dengan meminjam ungkapan Deutch bahwa "*the nation-state offers most of its members a stronger sense of security, belonging, or affiliation, and even personal identity, than does any alternative large group*". Penegasan di atas menarik untuk diperhatikan, karena kita membutuhkan dunia yang bermakna bagi diri sendiri dan bagi kolektivitas. Dalam negara-bangsa dan nasionalisme kita bisa menemukannya secara lebih bermakna keseluruhan *sense* yang diperlukan dibandingkan dengan

konsepsi-konsepsi pengaturan kehidupan bersama lainnya. Di dalam negara-bangsa yang mewakili warganya dan memberikan mereka suatu perasaan *belonging* pada keseluruhan kesatuan, bersemayam nasionalisme. Karenanya secara ideal, nasionalisme dan negara-bangsa mengharuskan adanya "perkawinan" antara *civil administration* dan *self-conscious patriotism* dari warganya. Tanpa itu, negara-bangsa tidak akan pernah menjadi "an abstract for which citizens are nonetheless willing to die".*****

Daftar Pustaka

- Alter, Pater. (1998). *Nationalism*. London: Hodde and Soughton Ltd.
- Anderson, Benedict. (1983). *Imagined Communities*. London: Verso.
- Bung Karno, *Di Bawah Bendera Revolusi*.
- Connor, Walker. (1991). *From Tribe to Nations, History of European Ideas*, 13 (1/2) 1991.
- Deutch, Karl. (1966). *Nations and Social Communication*, NY: MIT Press.
- Feith, Herbert. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Cornell: Ithaca Cornell.
- Gellner, Ernest. (1983). *Nations and Nationalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Hobsbawm, E.J. (1990). *Nations and Nationalism since 1970*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hutchinson, John. (1994). *Modern Nationalism*, Simon & Schuster. London: Fontana Press.
- Horsman, Mathew dan Marshall, Andrew. (1995). *After the Nation State*. London: Harper Collins Publishers.
- Pfaff, Williem. (1983). *The Wrath of Nations*. NY.
- Prasetiantono, Toni. (2005). *The Political Economy of Privatization of State-owned Enterprises in Indonesia*. Canberra: Australian National University.

Rotberg, Robert I., (2003). 'The Failure and Collapse of Nation States: Breakdown Prevention.' Rotberg, Robert I.(ed), *When State Fail*, PUP.

Rotberg, Robert I. (2004). 'Failed States, Collapse States, Weak State: Cause and Indicators. Dalam Rotberg, Robert I. (ed), *State Failure and State Weakness in Time of Error*. PUP, 2004.

Seton-Watson, Hugh, (1977). *Nations and States: An Enquiry into the Origin of Nations and the Politics of Nationalism*. London: Methuen & Co. Ltd.

Media dan Dokumen

Asiaweek, edisi 22/1/1999

Cemex Annual Report, 1998.

Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA), 1998.

Statement Penolakan Kedatangan Bush, *Perhimpunan Rakyat Pekerja*, *Senin, 13 November 2006*)

Situs

www.kompas.com. **Wajah 48** Partai Peserta Pemilu 1999.

www.eramuslim.com. Amien Rais: Terima Saja Bush Ala Kadarnya, **Terus Suruh Dia Pulang**, *Senin, 13 November 2006*

www.kompas.com. Toni Prasetyantono, Akhir Elegan Sengketa Cemex, **Rabu, 29 Maret 2006**.